



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini adalah merupakan salah satu wujud diimplementasikannya good governance dan adanya tanggung jawab instansi untuk melaporkan kepada pemberi mandat dan pemangku kepentingan atas capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini akan memberi arti bagi para penggunanya dan sebagai salah satu bentuk gambaran peranan yang dapat diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menuju " Good Governance ".

Samarinda, 24 Januari 2022

Inspektur,



Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19740818 199703 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon II dengan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dicapai pada tahun 2021 serta seluruh program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan atas dokumen Penetapan Kinerja 2021 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini juga menyajikan semua capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja dan Program serta Kegiatan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana kinerja baik pada level output maupun outcome kegiatan yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis-analisis yang dilakukan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini juga dapat mengidentifikasi sejumlah keberhasilan kinerja yang telah dicapai dan kegagalan-kegagalan sebagai perbaikan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan komitmen seluruh unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam

merealisasikan tanggung jawabnya kepada stakeholder. Target dan indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Penilaian kinerja atas Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dilakukan terhadap indikator output maupun outcome kegiatan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 dengan cara membandingkan antara target indikator dengan realisasinya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menggambarkan dan menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan 4 (empat) sasaran, 17 (tujuh belas) indikator dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 90,52%. Sedangkan untuk pencapaian 3 Program dan 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan capai fisik **100%** dan realisasi anggaran/keuangan 74,83%. Untuk melaksanakan semua aktivitas tersebut disediakan dana sebesar Rp. 39.146.734.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.293.645.999,00 (74,83%).

Dalam penyerapan anggaran secara kuantitatif masih terdapat sisa anggaran, tetapi secara kualitatif, pencapaian telah dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal dan bertanggung jawab berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Sisa anggaran terjadi karena adanya efisiensi dalam pengguna anggaran, namun secara fisik telah dilaksanakan 100%.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan program serta kegiatan masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, namun dapat diatasi dengan baik dan sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi

secara berkelanjutan, maka telah diambil langkah-langkah perbaikan yang konkrit agar tercipta peningkatan kualitas kinerja yang berdampak pada optimalisasi realisasi perjanjian kinerja dan kualitas sumber daya manusia / personil aparat pengawasan selaku APIP.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan bahwa Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dapat dijadikan tolok ukur peningkatan kinerja yang dipergunakan sebagai alat pembanding dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Aspek Strategis Organisasi	6
F. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi (Isu Strategis)	8
G. Sarana dan Prasarana Kerja	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perencanaan Strategis	13
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Impelementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	29

B.	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	31
C.	Analisis Capaian Kinerja	33
1.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kerja Tahun ini	34
2.	Membandingkan Antara Realisasi Kerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir	52
3.	Membandingkan Realisasi Kerja sampai dengan Tahun ini dengan Target RPJMD/Renstra	63
4.	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	66
5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah dan Akan Dilakukan	67
6.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	79
7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	81
D.	Realisasi Anggaran	86
1.	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	87
2.	Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan	95
BAB IV	PENUTUP	99
LAMPIRAN – LAMPIRAN :		
1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 s.d. 2023	
2.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan 2021 secara berjenjang	
3.	Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2020 dan 2021	
4.	Rencana Aksi Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021	
5.	Rencana Kerja Tahun 2020 dan 2021	
6.	Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Prov. Kaltim Tahun Sebelumnya (Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya).	
7.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan	6
Tabel 2	Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	9
Tabel 3	Perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2019 s.d. 2023	15
Tabel 4	Program dan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran	17
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	23
Tabel 7	Target Belanja Tahun 2021	25
Tabel 8	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021	27
Tabel 9	Hasil Evaluasi Tahun 2021 atas LKjIP Tahun 2020	29
Tabel 10	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2021 atas LKjIP Tahun 2020	30
Tabel 11	Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2021	31
Tabel 12	Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dipenghujung bulan Desember 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pada tahun 2020 telah dilakukan revisi atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membantu tugas Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS DAN FUNGSI.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan, asset dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam bidang membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh perangkat daerah.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 34 Tahun 2020, yaitu Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atau Penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. Penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

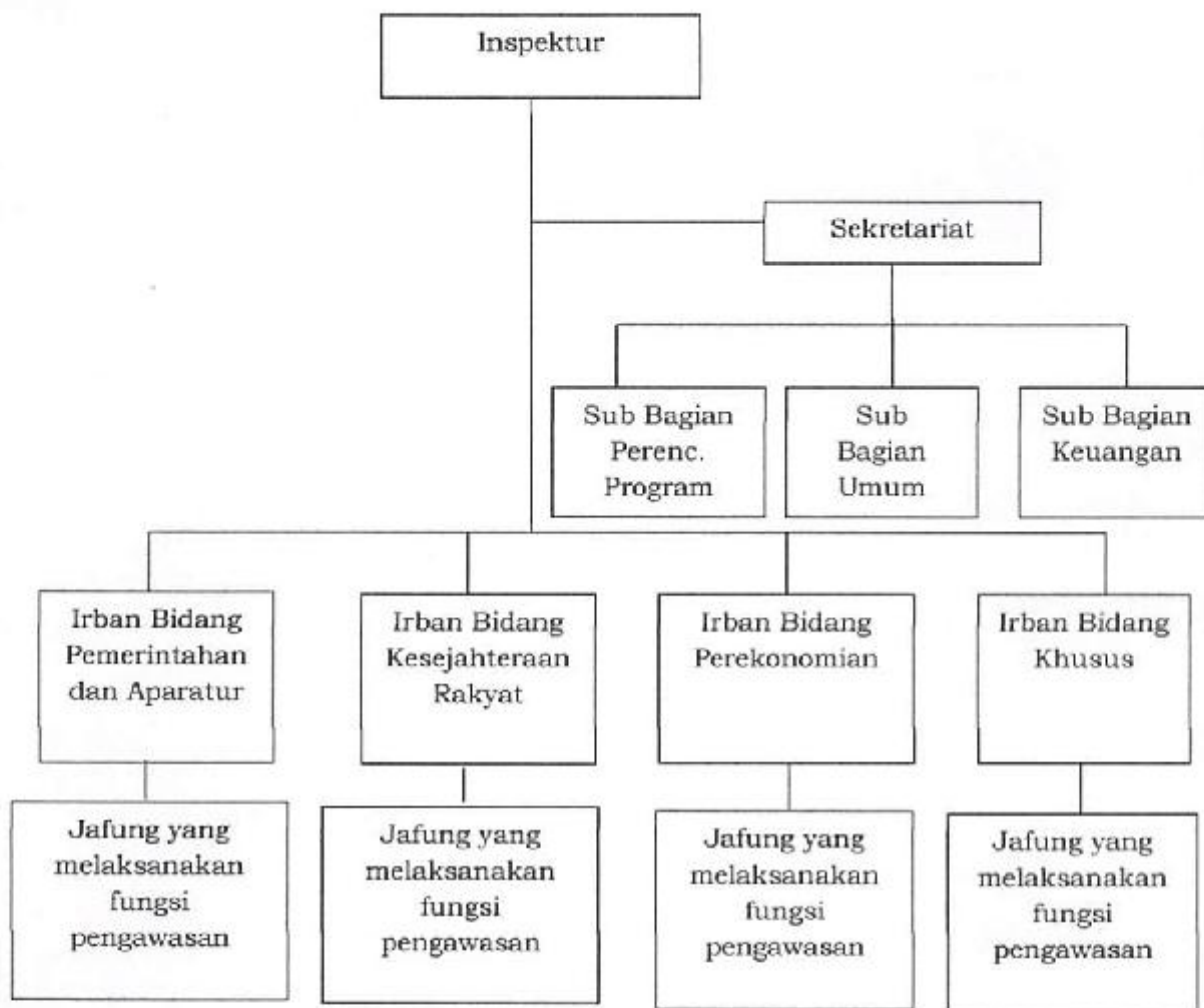
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan Program.
 2. Subbagian Umum.
 3. Subbagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :



D. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 berjumlah pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 107 orang yang terdiri dari 77 orang PNS/ASN dan 30 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 107 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.

Tabel 1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	1	2	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	27	17	4	39	1	-	6	35	3	-	-	-
Fungsional Umum	16	8	-	12	11	1	-	6	10	6	1	1
Jumlah PNS	49	28	11	53	12	1	10	46	13	6	1	1
Jumlah Honor/PTT	18	12	-	-	-	-	-	19	2	9	-	-
Jumlah PNS dan PTT	67	40	11	53	12	1	10	65	15	15	1	1

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Aspek strategis organisasi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, adalah baik aspek strategis internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. **Aspek Peraturan Perundang-Undangan**, dukungan peraturan perundang-undangan menjadi sangat strategis bagi organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. **Aspek Kompetensi SDM**, dukungan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik segi kualitas dan kuantitas.
3. **Aspek Produk Yang Dihasilkan**, kekuatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan, hal ini sesuai dengan amanat PP 12 Tahun 2017 dan PP 60 Tahun 2008 harus bersifat strategis. Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Gubernur yang menjalankan amanah rakyat.
4. **Aspek Metode Pengawasan**, perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya program pemeriksaan/pengawasan, reviu, evaluasi dan monitoring, pemberian advis/saran dan konsultasi dan kontrol internal.
5. **Aspek Sistem Penghargaan (Reward System)**, sistem penghargaan merupakan cara organisasi memberikan pengakuan dan imbalan kepada pegawai dalam rangka menjaga keselarasan kebutuhan individu dengan tujuan organisasi. Sistem penghargaan dapat mendorong perilaku pegawai atau pengukuhan atas perilaku yang telah dilakukan pegawai. Sistem penghargaan dapat meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi, mendorong pencapaian misi dan strategi organisasi, dan membantu mencapai keberlangsungan keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai *shareholder*.
6. **Aspek Budaya Organisasi**, yang meliputi :
 - a. **Integritas**, suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh Aparatur Pengawasan untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan atau kredibilitas pribadi dan organisasi.
 - b. **Profesional**, kesanggupan seluruh Aparatur Pengawasan untuk melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang ditetapkan, dengan dilandasi sikap dan semangat kerja tinggi,

berkomitmen, pantang menyerah dan memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan yang tinggi.

- c. **Obyektif**, sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta metarial yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
- d. **Independent**, sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedapankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.
- e. **Perbaikan terus menerus**, sikap untuk selalu mengembangkan diri, mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan Organisasi untuk mencapai kaulitas pelayanan terbaik.

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI (ISU STATEGIS)

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah

Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020.

3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran, khususnya untuk kegiatan pengawasan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA.

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu adanya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.

Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2021 :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Tanah	4.385	M2
2.	Gedung Kantor	2.300	M2
3.	Ruang Rapat	2	Ruang
4.	Ruang Kerja Pejabat Struktural	9	Ruang
5.	Ruang Kerja Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum	9	Ruang
6.	Ruang Arsip	7	Ruang
7.	Ruang Perpustakaan	1	Ruang

8.	Ruang Musholla	2	Ruang
9.	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
10.	Ruang Gudang Barang	4	Ruang
11.	Taman	1	Area
12.	Kendaraan Bermotor Roda 4	26	Buah
13.	Kendaraan Bermotor Roda 2	13	Buah
14.	Meja Kerja	151	Buah
15.	Meja Komputer	16	Buah
16.	Meja Rapat	8	Buah
17.	Meja Makan	1	Buah
18.	Meja Rapat Pimpinan	5	Set
19.	Kursi Putar	269	Buah
20.	Kursi Tamu	15	Set
21.	Kursi Lipat (Rusak Berat)	44	Buah
22.	Kursi Rapat	30	Buah
23.	Lemari Besi Arsip	36	Buah
24.	Lemari Perpustakaan	2	Buah
25.	Filing Cabinet	29	Buah
26.	Buffet	13	Buah
27.	Komputer / Computer	53	Unit
28.	Printer	82	Unit
29.	Laptop	90	Buah
30.	Dispenser	16	Buah
31.	Mesin Tik	3	Buah
32.	Pesawat Telepon	10	Buah
33.	Kamera	7	Buah
34.	Jam Dinding	4	Buah
35.	Mesin Photo Copy	2	Buah
36.	Whiteboard	6	Buah
37.	Projektor / LCD / Infocus	18	Buah
38.	AC Split	8	Buah
39.	Brandkas	2	Buah
40.	Microphone	42	Buah
41.	Intercom Mobil	1	Buah
42.	Buku Perpustakaan	885	Buah
43.	Mesin Absensi	3	Buah
44.	Kulkas	9	Buah
45.	Sound System	4	Set
46.	Speaker Besar	2	Pasang
47.	Amplifier	1	Unit
48.	TV Led	3	Unit
49.	Sofa	1	Unit
50.	Lemari Hias	1	Buah
51.	Mesin Cuci	1	Buah
52.	Karpet	3	Buah

53.	Rak Buku / TV	2	Set
54.	Organ / Electone	1	Buah
55.	Wireless	1	Buah
56.	Tempat Tidur	1	Set
57.	Lemari Pakai	2	Buah
58.	Water Heather	1	Buah
59.	Monitor CCTV	1	Buah
60.	Lensa CCTV	2	Buah
61.	Handy Talkie	3	Buah
62.	Locker Rak	8	Buah
63.	Komputer Mainframe / Server	1	Unit
64.	Jaringan Komputer	1	Unit
65.	Software Off-Line Komputer	3	Unit
66.	Rak Peralatan	1	Buah
67.	Mesin Hitung Manual	1	Buah
68.	Alat Ukur Altimeter	19	Buah
69.	CPU	1	Buah
70.	GPS	4	Buah
71.	Faximale	1	Buah
72.	Tape Rocerder	4	Buah
73.	Genset	1	Unit
74.	E-Spot Asfalt Highway	1	Set
75.	Gorden	3	Set
76.	Lemari Rak Arsip Besi	50	unit
77.	Handy Cam	2	unit
78.	Finger Print	4	unit
79.	Tablet / Gadget	6	unit
80.	Perangkat Meeting On Desk (MOD) Conference	1	set
81.	Meja Kerja Staf	25	Unit
82.	Kursi Kerja Staf	25	Unit
83.	Scanner	14	Unit
84.	PC All In One	25	Unit
85.	Meteran Roda	2	Buah
86.	Hard Disk	11	Buah
87.	Brite Screen Tripod	1	Buah
88.	Penghancur Kertas	4	Buah
89.	Lemari ½ Biro	6	Buah
90.	Aplikasi Pengawasan + Sim HP	2	Perangkat
91.	AC Standing	5	unit
92.	Lemari Kaca Arsip	6	unit

Dari perlengkapan berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sudah dirasakan mencukupi dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan, meskipun dalam perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi atau organisasi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pada perangkat daerah tidak ada lagi visi dan misi perangkat daerah, sedangkan visi dan misi perangkat daerah tersebut mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah atau gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Visi.

"Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat "

2. Misi.

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

3. Tujuan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peran untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Instansi pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.
4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

4. Sasaran.

Salah satu unsur dalam pencapaian kinerja yang akan memberikan hasil capaian kinerja yang optima, agar lebih dicapai tingkat keberhasilannya yang sudah ditergetkan, maka Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Meningkatkan Pengendalian Internal pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota.
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disajikan secara singkat gambaran penting dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023 yang memuat antara lain Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Target Tahunan dan Program./Kegiatan serta IKU yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 s.d. 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Maturitas SPIP Pemda Level 3	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	1	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	0	2	4	4	6	10
			3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	88	90	92	95	98	100
			4	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	75	80	85	85	95	100
			5.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	%	70	80	85	85	95	100
			6	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori \geq B	PD	27	29	31	31	34	36
			7	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2	3	3	3	3	4

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Maturitas SPIP Pemda Level 3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi" dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	5	5	6	6	7	7	
			2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Kategori B	Kab/ Kota	5	5	6	6	7	7	
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dari KKN	Hasil Penilaian Integritas Pemda Skor 85	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	1	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
			2	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :								
				LHKPN	%	54	60	65	70	75	80	
				LHKASN	%	50	60	65	70	75	80	
			3	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lap	10	15	20	20	30	35	
			4	Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	60	65	70	75	80	85	
			5	Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	1	1	1	1	1	
			6.	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	-	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP Pada Level 3	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	1	Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	2	3	3	3	3	4	
			2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	35	50	55	55	60	65	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	0	80	85	90	95	100
			2.	Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	0	1	2	3	4	5
			3.	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	%	70	80	85	90	95	100
			4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	75,39	76	78	80	81	82

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta Target yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja, maka diperlu adanya Program dan Kegiatan yang menunjang sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 4

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	1. Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan
			2. Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemda
			3. Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

			4	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			5.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti/ ditangani	%			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			6	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			7	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi" dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota
			2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota
2.	Terwujud nya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dari KKN	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	1	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			2	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian			Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monev, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				LHKPN	%			
				LHKASN	%			

			3	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lap			Koordinasi, Monev, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			4	Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor			
			5	Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	PD			
			6.	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai/ Bobot	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	1	Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang			
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			2.	Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit		Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3.	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

			4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
--	--	--	---	--	-------	--	--	---

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalam Renstranya tahun 2019 s.d. 2023 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan dasar dari Penetapan Kinerja yang akan ditetapkan setiap tahunnya dengan targetnya selanjutnya akan dicapai dengan dukungan program dan kegiatan. Penetapan Indikator Utama ini didasarkan atas tugas dan fungsi Inspektorat daerah Provinsi Kalimantan Timur serta disesuaikan dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Berikut ini disampaikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran dari tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 s.d. 2023.

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Dalam rangka mempertahankan Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemprov. Kaltim sesuai SAP, Pengendalian Intern dan kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Buku I	Inspektur
		Jumlah Perangkat Daerah Yang berkinerja " Tinggi "	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan/Audit.	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja " Tinggi " sesuai	Laporan Hasil Audit / Pemeriksaan	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
				hasil pemeriksaan/Audit		
		Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Belum optimalnya capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan operasional	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di bagi pagu anggaran Program dan Kegiatan di kali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori $\geq B$	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP kategori B dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim.	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di Pemda Prov. Kaltim	Laporan Hasil Evaluasi BPKP	Inspektur
		Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	Belum optimalnya tindak lanjut atas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin	Inspektur Bidang Pengawasan Khusus.
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat "Sangat Tinggi" dalam Evaluasi KPPD	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Kategori "B"	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP kategori B dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kalimantan atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat	Inspektur Bidang Pengawasan Khusus.
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN dan LHKASN di kali 100%.	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi	Unit Pengendalian Gratifikasi
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey	Inspektoral berkerjasama dengan BPS dan KPK.
		Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Belum semua perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM	Tim Internal dan Eksternal ZI Menuju WBK/WBBM
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Belum optimalnya nilai/skor penilaian atas RB pada Perangkat Daerah	Nilai / Skor RB yang didapat setelah dilakukan evaluasi melalui LKE RB	Laporan Hasil Penilaian RB PD	Tim RB Inspektoral
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP	Inspektoral berkerjasama dengan BPKP
		Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian	Inspektur

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.

Pada tahun anggaran 2021, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Timur dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerkntahan Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	4
		c.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3
		d.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	95
		e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	31
		d.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	85
		f.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	85
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	6
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori " B "	6
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100
		b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN	70

			LHKASN	70
		d.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20
		e.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	75
		f.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	1
		g.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36,30
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3
		b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	55

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka pada tahun 2021 berdasarkan arah kebijakan, ditetapkan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Alokasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 39.146.734.000,00 dan realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 29.293.645.999,00 (74,83%) .

2. Target Belanja Tahun 2021.

Dari dari anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2021 sebesar Rp.39.146.734.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.29.293.645.999,00 (74,83%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.9.853.088.001,00 (25,17%)

Adapun realisasi keseluruhan Belanja Tahun 2021 sebagaimana perincian sebagai berikut :

Tabel 7
Target Belanja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.307.481.280,00	20.941.165.588,00	79,61	100
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	419.553.770,00	295.007.716,00	70,31	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	419.553.770,00	295.007.716,00	70,31	100
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.859.291.900,00	14.669.759.385,00	82,14	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.175.860.000,00	14.144.407.194,00	82,35	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	683.431.900,00	525.352.191,00	76,87	100
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.850.080.000,00	2.734.716.525,00	71,03	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.390.000,00	146.281.000,00	88,45	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.684.690.000,00	2.588.435.525,00	70,25	100
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.321.372.040,00	2.543.307.303,00	76,57	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.982.962.100,00	1.738.549.975,00	87,67	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.864.500,00	203.181.225,00	99,66	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.495.440,00	101.602.550,00	90,32	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.022.050.000,00	499.973.553,00	48,92	100
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.793.570,00	529.643.124,00	80,52	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	7.376.000,00	18,44	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.214.360,00	45.822.180,00	43,97	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.579.210,00	476.444.944,00	92,77	100
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	199.390.000,00	168.731.535,00	84,62	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.190.000,00	117.307.285,00	79,70	100

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.200.000,00	33.438.550,00	97,77	100
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000,00	17.985.700,00	99,92	100
II.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	10.104.090.400,00	7.093.609.671,00	70,21	100
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.268.767.440,00	2.438.315.568,00	74,59	100
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	266.500.000,00	174.580.500,00	65,51	100
	Reviu Laporan Keuangan	801.965.000,00	736.358.300,00	91,82	100
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.366.702.440,00	1.013.725.590,00	74,17	100
	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP	833.600.000,00	513.651.178,00	61,62	100
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.835.322.960,00	4.655.294.103,00	68,11	100
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	250.000.000,00	87.736.662,00	35,09	100
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.585.322.960,00	4.567.557.441,00	69,36	100
III.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.735.162.320,00	1.258.870.740,00	46,03	100
1.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	2.735.162.320,00	1.258.870.740,00	46,03	100
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	552.491.000,00	344.494.676,00	62,35	100
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.182.671.320,00	914.376.064,00	41,89	100
		39.146.734.000,00	29.293.645.999,00	74,83	100

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021.

Dari dari anggaran sebesar Rp.39.146.734.000,00, maka dapat dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dengan persentase adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	1.993.202.000,00	5,10%	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu Atas Laporan Keuangan PD dan Pemda • Audit Kinerja PD • Pemeriksaan Operasional PD • Evaluasi Maturitas SPIP • Evaluasi Sakip PD • Monev TLHP APIP dan BPK • Monev TLHP atas Disiplin ASN
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	954.720.000,00	2,44%	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi EKPPD Kab/Kota • Evaluasi SAKIP Kab/Kota • Evaluasi SPM Kab/Kota
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotismen	948.158.000,00	2,43%	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Khusus /Investigasi • Monev LHKPN dan LHKASN

				<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Gratifikasi • Survey Penilaian Integritas • Pemb. Zona Integritas WBK/ WBBM • Penilaian Mandiri RB • Aksi PPK dan Stranas PK • Tim Saber pungi
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	2.278.800.000,00	5,83%	Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pengemb. Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan • Peningkatan Level Kapabilitas APIP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI.

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 700/2289-Khusus/Itprov/V/2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan hasil Evaluasi sebesar **79,15** atau predikat **“BB” (Sangat Baik)**, sebagaimana tabel hasil evaluasi berikut ini :

Tabel 9
Hasil Evaluasi Tahun 2021 Atas LKjIP Tahun 2020

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2018	Nilai 2019	Tambah /Kurang /Tetap
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,38	26,52	+ 0,14
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,63	20,63	Tetap
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,22	12,22	Tetap
4.	Evaluasi Kinerja	10	8,08	7,43	- 0,64
5.	Capaian Kinerja	20	11,85	12,35	+ 0,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79,15	79,15	Tetap
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi.

Sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap LKjIP Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdapat beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti, yaitu :

Tabel 10
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2021 atas
LKjIP Tahun 2020

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP DARI
INSPEKTORAT PROV. KALTIM TAHUN SEBELUMNYA TAHUN 2020
(REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTINYA)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Belum / Sudah
1.	Rencana Aksi atas Kinerja dimonitor setiap triwulan belum menunjukkan perbaikan	<p>Pada tahun 2021 sudah dibuatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dan setiap 3 bulan dilakukan evaluasi atas target dan capaian yang telah ditetapkan beserta anggarannya 2. Pada tahun tahun 2021 Pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membuat Matrik Capaian Kinerja dan pada tahun 2021 dan ada penambahan pada Matrik Capaian Kinerja yaitu Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 secara triwulan dan penanggung jawabnya. 	<p>Sudah dibuat Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dan Matrik Capaian Kinerja Tahun 2021 yang dimonitoring setiap triwulan dan ada penanggung jawabnya.</p> <p>Diharapkan dengan adanya target capaian yang dimonitor setiap triwulan dan ada penanggungjawabnya, bisa meningkat dan menunjukkan perbaikan dan hasil maksimal.</p>

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 yang pengesahannya dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 24 Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050.2/999.a/ltprov/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar **90,52 %** sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11
Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Saluan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Opini Atas LKPD Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	WTP	WTP	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Perangkat	PD	4	Triwulan I	-	-	-

		Daerah Yang Berkinerja Baik			Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	4	1	25
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Capaian Pogram dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	95	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	75,00	78,94
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	31	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	31	29	93,55
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	85	81	95,30
		Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ ditangani	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	85	75	88,24
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemda Kab/ Kota yang mendapat predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	6	6	100
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	6	8	133,34
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	100	100	100

		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	70	Triwulan I	70	81	115,72
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	20	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	20	14	70
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	75	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	75	66,35	88,47
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	1	1	100
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai/ Bobot	36,30	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	36,30	24,12	66,45
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme APIP	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	55	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	55	46	83,64
		Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021, yaitu terdapat 4 sasaran dengan 17 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 4 sasaran dan 17 indikator

telah dicapai sebesar **90,52 %**. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2021 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi : realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan akuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan dengan melakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan melalui Simda BMD, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah yang dikuasai pihak lain, sertifikasi tanah pemda, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP serta melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penataan keuangan daerah.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	4	1	25

Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 4 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 1 (satu) perangkat daerah dengan capaian 25%. Pencapaian ini berdasarkan hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada 6 perangkat daerah yang menjadi sample, yaitu BPSDM, Biro Umum, RSJD Atma Husada Mahakam, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan. Audit Kinerja Pada Perangkat Daerah ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Audit Kinerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :700/2043/ltprov/2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kriteria penilaian meliputi : Sangat Tinggi (skor 90-100), Tinggi (skor 70-89), Sedang (skor 60-69), Rendah (skor 51-59) dan Sangat Rendah (skor <50). Dari hasil Audit Kinerja yang dilakukan pada 6 (enam) perangkat daerah tersebut, yaitu 5 (lima) perangkat daerah rata-rata nilai capaiannya adalah " Sedang" (skor 60-69) dan 1 (satu) perangkat daerah RSDJ Atma Husada Mahakam capaiannya " Tinggi " (skor 70-89). Dari hasil audit kinerja yang dilaksanakan terhadap 6 perangkat daerah diperoleh 1 perangkat daerah dengan capaian tinggi. Tidak tercapainya target, hal ini disebabkan antara lain masih terdapat rekomendasi, yaitu : Merumuskan pendelegasian wewenang dan kebijakan mendukung terciptanya akuntabilitas dan pengendalian; b. Membuat kebijakan atau Standar Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan serta pendokumentasian atas pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib. Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dan juga salah faktor tidak tercapainya kinerja yang baik salah satunya adalah pedoman yang dibuat kemungkinan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai untuk perangkat kinerja yang baik, hal ini diperlukan adanya revisi atas pedoman tersebut.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	95	75	78,94

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 95 % dan telah dicapai sebesar 75,00 % dengan capaian sebesar 78,94%, hal ini menunjukkan bahwa capaian atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 75,00% dari target yang ditetapkan sebesar 95,00%, hal ini menunjukkan bahwa target tidak tercapai, dan hal ini disebabkan adanya anggaran yang semula difocusing dikembalikan lagi pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan ada perubahan rencana penyerapan anggaran, masih adanya pandemi covid-19 karenanya banyak pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting / Vartual dan keterbatasan SDM pengawasan dan luasnya cakupan pengawasan yang direncanakan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap capaian program dan kegiatan dalam rangka mendukung penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	3	100

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain : Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau *Terdefinisi* yaitu

pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai pilot project Maturitas SPIP Terintegrasi.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain :

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap : (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/rekonsiliasi, (6) Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.

2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.

Dari hasil evaluasi tersebut disarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi.
2. Mengembangkan sistem informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
3. Melakukan identifikasi risiko dan pengendalian yang telah direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian Risiko dan implementasinya.
4. Mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) pada Website Pemda.

Pada tahun 2021 terbitkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan baru akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan melakukan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP Terintegrasi dan selanjutnya pelaksanaan evaluasi kepada 11 perangkat daerah tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemda Prov. Kaltim.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	31	29	93,55

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B pada tahun 2021 ditarget sebanyak 31 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29 perangkat dengan capaian 93,55%. Pencapaian ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dari 31 target dan dicapai 29 perangkat daerah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 37 PD dengan hasil evaluasi sebagai berikut : 15 PD dengan katagori BB/Sangat Baik, 14 PD dengan katagori B/Baik, dan 8 PD dengan katagori CC/Cukup. Dari hasil evaluasi keseluruhan terhadap SAKIP 37 Perangkat Daerah pada tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan dengan hasil evaluasi 78,38 % dengan katagori BB/Sangat Baik dan B/Baik. Penilaian ini didasarkan atas hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja. Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut telah dilakukan berbagai upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu, diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	85	81	95,30

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 85% dan telah dicapai 81% dengan capaian sebesar 95,30%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini masih rendah dan belum signifikan dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya jumlah rekomendasi temuan yang setiap tahun selalu bertambah sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan, masih terdapat rekomendasi temuan yang sudah lama dan berlarut-larut atau sulit untuk ditindaklanjuti, masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan masih kurangnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya dan belum adanya reward dan punishment/sanksi. Upaya-upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP dan apabila dimungkinkan adanya pemberian reward dan punishment/sanksi dan mengupayakan penyelesaiannya melalui Majelis TPTGR. Diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan dapat meningkat dan terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
7.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti / Ditangani	%	85	75	88,24

Pencapaian persentase pelanggaran disiplin ASN yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 75 % dari rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 4 pengaduan masyarakat terkait disiplin ASN yang telah ditindak lanjuti dengan penjatuhan disiplin ASN, namun dari 4 pengaduan tersebut, ada 3 rekomendasinya sudah dibuatkan Surat Keputusan Penjatuhan Disiplin ASN, 1 rekomendasi dalam proses. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang

ditetapkan, karena dari 4 rekomendasi terkait hukuman disiplin, 3 sudah ditindak lanjuti dan 1 rekomendasi dalam proses pembuatan surat ketetapan/keputusan atas status hukuman yang diberikan. Namun dalam rangka meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi penjatuhan disiplin ASN tersebut, konsultasi dan koordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur perlu ditingkatkan yang fungsinya membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin. Pada tahun 2021 ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN yang dilakukan oleh ASN, dan hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/ASN yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/ASN telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/ASN dalam rangka pembentukan karakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai/PNS.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat "Sangat Tinggi" dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	6	6	100

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu. Dari hasil evaluasi terdapat 6 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat " Sangat Tinggi ", yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat "Tinggi" yaitu : Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya komitmen dari Pemda Kab/Kota untuk meningkatkan capai kinerja yang didukung dengan data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka peningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya – upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan kooordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/Kota	6	8	133,34

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 8 Kab/Kota dengan capaian sebesar 133,34%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB melauai daring/virtual zoom, hal ini dilakukan dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19. Terhadap capaian ini, diharapkan pada tahun –tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan rancana aksi dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, diantaranya adalah : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah

ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana dari 17 (tujuh belas) pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat ditangani dan dilakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Tertanganinya pengaduan masyarakat ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran dan SDM serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Persentase Tingkat Kepatuhan Pemyampaian				
	LHKPN	%	70	74,17	105,96
	LHKASN	%	70	76,92	110,00

Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 70% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 74,17% dengan capaian 105,96% dan kepatuhan penyampaian LHKASN sebesar 76,92% dengan capaian 75,55 s.d. 80,00%%. Pencapaian ini berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimana dari jumlah yang wajib LHKPN sebanyak 816 orang dan yang telah Melaporkan sebanyak 742 orang, tepat waktu sebanyak 726 orang, terlambat sebanyak 16 orang dan yang belum menyampaikan sebanyak 0 orang. Sedangkan untuk LHKASN dari yang wajib LHKASN sebanyak 4.639 orang sebagaimana yang telah ditetapkan, yang sudah lapor sebanyak 3.539 orang dan yang belum laporan sebanyak 1.100 orang. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN ini telah dilakukan sosialisasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, namun hal yang penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	20	14	70

Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi di tahun 2021 dari target 20 laporan dan telah dicapai 14 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian sebesar 70%, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi masih rendah, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran untuk melakukan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi, atau juga kurangnya pengetahuan si penerima gratifikasi apa kriteria yang termasuk gratifikasi. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Grattifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan dan penolakan gratifikasi dan dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPD) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan usaha lain juga diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi. Sampai dengan tahun 2021 ini baru ada 3 UPG pada Perangkat Daerah yaitu : RSJD Atma Husada Mahakam, RSUD Kanujoso dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Nilai	75	66,35	88,47

Pada tahun 2021 pelaksanaan survey penilaian integritas (SPI) dilaksanakan oleh KPK-RI dengan bekerjasama dengan Pihak Ketiga, penilaian dilakukan melalui aplikasi e-SPI KPK-RI. Berdasarkan Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda/KL yang dibuat oleh Tim Penyusun Survey KPK hasil survey penilaian integritas pemda Kalimantan Timur Tahun 2021 dicapai pada skor/nilai 66,35 dari yang ditarget tahun 2021 sebesar 75 skor/nilai. Kegiatan survey penilaian integritas pemda ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 kegiatan SPI ini dimulai dengan sosialisasi, entery meeting, pengumpulan data dan wawancara terhadap responden pada perangkat daerah di lingkungan Pemda Prov. Kaltim, Pengguna Layanan dan Ekspert yang dipilih secara acak dan dilakukan penilaian oleh Tim KPK RI.

Ada beberapa permasalahan integritas yang paling menonjol di lingkungan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 adalah antara lain: (1). Risiko korupsi ditemukan hampir di seluruh instansi peserta SPI. (2). Risiko korupsi yang paling banyak ditemukan adalah : 15% responden kalangan pegawai meyakini bahwa risiko penerimaan gratifikasi/suap ditemui di banyak instansi peserta SPI, 5% dari responden eksternal dan 18% responden eksper, (3). Risiko adanya perdagangan pengaruh (trading in influence) ditemukan di banyak instansi peserta SPI 2021. Sekitar 1 dari 4 responden

pegawai berpendapat keberadaan risiko trading in influence, baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan pemerintah. (4). Berdasarkan 29% responden pegawai, permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa juga ditemukan di berbagai instansi peserta SPI 2021 baik dalam bentuk nepotisme hingga gratifikasi dalam proses pengadaan. (5). Satu dari 2 pegawai menyatakan pemanfaatan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi pun masih terjadi di hampir seluruh instansi dan 29% responden eksper (6). 9% dari responden pegawai juga menilai bahwa penyalahgunaan anggaran dalam perjalanan dinas masih terjadi di berbagai instansi peserta SPI 2021.

Beberapa upaya pencegahan korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdaya guna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.
3. Pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
4. Perdagangan pengaruh (trading in influence) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur

pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.

5. Yang tak kalah penting adalah optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Terakhir, memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel

Upaya dan pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pilot project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	1	100

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 1 perangkat daerah, dengan capaian 100% yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani. Pada tahun 2021 ini telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada RSUD AWS Samarinda, namun berdasarkan hasil evaluasi ternyata masih belum memenuhi angka hasil evaluasi untuk diusulkan sebagai Perangkat Daerah ZI Menuju WBK, diharapkan pada tahun 2022 selain RSUD AW. Syahrani dapat juga ditambah dengan perangkat daerah lain yang sudah berkomitmen untuk melaksanakan ZI

menuju WBK/WBBM dapat disimpulkan menjadi ZI menuju WBK/WBBM dengan beberapa aksi yang telah dilakukan antara lain melakukan beberapa perbaikan dan pemenuhan dokumen sesuai dengan hasil rekomendasi evaluasi yang telah dilaksanakan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	36,30	24,12	66,45

Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah pada tahun 2021 mencapai 24,12 skor/nilai (67,11%) dari skor/nilai standar 36,30. Hal ini belum tercapai terhadap target yang ditetapkan sebesar 36,30 skor/nilai. Penilaian dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah yaitu Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Bappeda, BKD, Disperindagkop, RSUD AWS, RSUD Kanujoso dan RSJD Atma Husada Mahakam. Penilaian meliputi terhadap aspek pengungkit dan reform, dari hasil penilaian diperoleh angka rata-rata nilai reformasi birokrasi atas 10 PD tersebut mencapai 24,12 nilai. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Penilaian			Bobot	Nilai Rata-Rata
Pengungkit			36,30	24,12
1.	Pemenuhan		14,60	10,72
	1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,24
	2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,60
	3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,53
	4.	Penataan Tata Laksana	1,00	0,77
	5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,17
	6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,24
	7.	Penguatan Pengawasan	2,50	1,41
	8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publi	2,50	1,65
2.	Reform		21,70	13,64
	1.	Reform	21,70	13,64

Hasil rekomendasi penilaian RB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (a) membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c). Konsensus Assesor PMPRB, (d). Pembentukan Agent of Change, (e). Identifikasi dan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian Struktur Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan birokrasi, (h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i). Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k). Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPI, dan ZI (l). Maklumat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya – upaya diantaranya melakukan sosialisasi / bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 4 : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme dan Profesional APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	3	100

Pada tahun 2021 penilaian kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak dilakukan, tetapi selama tahun tersebut yang dilakukan adalah penyelesaian atas sara/rekomendasi yang disampaikan pada laporan hasil evaluasi. Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%, capaian ini telah sesuai dengan target yang dicanangkan secara Nasional yaitu pada Level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Penjamin Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : LQAPIP-43/PW17/6/2020 tanggal 16 Maret 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil QA disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada level 3 untuk semua elemen sebagai berikut :

No	Elemen	Level
1.	Peran dan Layanan	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3.	Praktik Profesional	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6.	Struktur Tata Kelola	3

2. Berdasarkan hasil QA tersebut, terdapat rekomendasi untuk menjadi perhatian dan perlu tindak lanjut yaitu :
 - a. Mendorong manajemen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
 - b. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui Workshop/Bimtek /Diklat untuk mendukung kegiatan pengawasan khususnya di bidang Audit Kinerja, Keinvestigasian, PPBR, Pengelolaan Risiko serta Sertifikasi Profesi antara lain CRMP.
 - c. Memutakhirkan peta auditan dan menggunakan *risk register* yang telah disusun oleh Perangkat Daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun PPBR.
 - d. Menekankan substansi hasil pengawasan *Management Oversight* untuk perbaikan kapasitas internal APIP serta ketaatan, kinerja dan *Governance Risk Control (GRC)* Pemerintah Daerah.

- e. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan *key process area* (KPA) secara baik dan terus menerus (*institutionalized*) serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
- f. Melakukan *self assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP level 3.

Berkenaan dengan rekomendasi dari hasil QA tersebut, diharapkan kepada Tim Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat rencana kerja / rencana aksi atas beberapa rekomendasi yang disampaikan dan selanjutnya melaksanakan rencana kerja/rencana aksi tersebut dalam rangka mempertahankan kapabilitas level 3 dan mempersiapkan untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi lagi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	55	46	83,64

Pada tahun 2021 pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar 83,64%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 46 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan

pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawasan. Pada tahun 2021 ini juga ada penambahan SDM Aparatur Pengawasan dari STAN sebanyak 8 orang yang berstatus sebagai calon Auditor.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator keberhasilan dari kinerja yang sudah ditetapkan, dimana akan terlihat adanya peningkatan maupun penurunan dari capaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2021 ini sejalan dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023 terdapat sasaran dan indikator yang berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan Visi dan Misi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Berikut ini disampaikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5-1) *100
1.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	WTP	Capai atas Opini WTP dapat dipertahankan. (100%)
2.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	%	0	0	1	Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya tidak ada dan tahun ini ada 1 PD (Tinggi) (25%)

3.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	95,39	96,38	75,00	Terjadi penurunan capaian, hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19. (-21,38%)
4.	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	3	3	3	Capaian pada level 3 dapat dipertahankan. (100%)
5.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	28	29	29	Tetap 29 OPD (100%)
6.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	81	80	Terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena rekomendasi belum seluruhnya ditindak lanjuti (-1%)
7.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	%	62,50	65,00	75,00	Terjadi peningkatan atas tindak lanjut (10%)

- Analisis pencapaian pada indikator kinerja Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terjadi stagnan atau dapat dipertahankan yaitu diperolehnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini WTP sejak tahun 2019 s.d. 2021. Hal ini disebabkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi telah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern dan adanya Kepatuhan/ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mempertahankan Opini WTP ini adalah, antara lain : Diterapkannya kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adanya perbaikan atas penatausahaan persediaan, perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, sertifikasi tanah dan pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin

yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaL serta terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

- Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik baru dilaksanakan pada tahun 2019-2021 hal ini dilakukan dalam rangka penilaian terhadap kinerja perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan yang berisiko tinggi berdasarkan identifikasi resiko yang dibuat. Sejak tahun 2019 s.d. 2021, baru ada 1 perangkat daerah yang berkinerja baik/tinggi, yaitu RSJD Atma Husada Mahakam. Penilaian kinerja yang dilakukan pada Perangkat Daerah berdasarkan hasil Audit Kinerja yang sesuai dengan 3 E (efisien, efektif dan ekonomis) terhadap program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dinilai berdasarkan pedoman yang telah dibuat.
- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Capaian program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2019 s.d. 2021 terjadi penurunan 21%, hal ini disebabkan karena daya serap anggaran yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masih rendah dari target yang ditetapkan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang sesuai dengan hasil Pemeriksaan Operasional yang dilaksanakan terhadap perangkat daerah di sisi lain serapan yang tinggi ini juga disebabkan adanya pemotongan / refocusing anggaran sebesar 50% pada setiap perangkat daerah yang kemudian dikembalikan lagi pada akhir tahun anggaran sekitar bulan Oktober 2021, sehingga menyebabkan perubahan perencanaan dan penyerapan anggaran, masih adanya pandemi covid-19, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara langsung dan dilaksanakan dengan virtual/zoom meeting. Diharapkan untuk maksimalnya penyerpaapan anggaran yang tertuang dalam Program dan Kegiatan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meningkat monev melalui Aplikasi TEPPRA, melaksanakan rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA.
- Analisis pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda, sejak tahun 2018 s.d. 2021 berada pada Level 3, penilaian telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2019 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5. Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Pada tahun 2021 terbitkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan baru akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan melakukan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP Terintegrasi dan selanjutnya pelaksanaan evaluasi kepada 11 perangkat daerah tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemda Prov. Kaltim.

- Analisis Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori $\geq B$ sejak tahun 2019 s.d. 2021 pencapaiannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 28 di tahun 2019, dan 29 pada tahun 2020 dan 29 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan berbagai upaya-upaya diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

- Analisis terhadap Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sejak tahun 2019 s. d. 2021 mengalami penurunan dalam tingkat penyelesaiannya terhadap rekomendasi / saran yang disampaikan dalam hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan BPK-RI. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah rekomendasi temuan, masih terdapat sisa rekomendasi temuan yang tahun sebelumnya yang statusnya masih belum selesai, masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan meskipun adanya peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan, masih kurangnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut adalah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan dan upaya tersebut, diharapkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan dapat meningkat, karena hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5-1) *100
1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	8	6	6	Pencapaian target sdh tercapai/ tetap (100%)
2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori " B "	Kab/Kota	4	6	8	Terjadi peningkatan (2%)

- Analisis terhadap Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi ” dalam Evaluasi KPPD dari tahun 2019 s.d. 2021 mengalami peningkatan, yaitu dari 5 Kab/Kota di tahun 2017 dan 2018 dan 6 di tahun 2020 dan 6 Kab/Kota di tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya perubahan kriteria /standar/ template penilaian/evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka meningkat kinerja pemda Kab/Kota diperlukan adanya komitmen dari Kepala Daerah pada Pemda Kab/Kota tersebut dan data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK), meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Kementerian Dalam Negeri serta Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.
- Analisis terhadap pencapaian Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B sejak tahun 2019 s.d. 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 6 Kab/Kota dengan katagori B dan pada tahun 2021 sebanyak 8 Kab/Kota dengan katagori B. Penilaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota pada 10 Pemda Kab/Kota melalui zoom meeting/ virtual dengan Pemda Kab/Kota. Terhadap capaian ini diharapkan pada tahun –tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan rancana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, yaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme
(KKN)**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5-1) *100
1.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100	100	100	Pencapaian 100%
2.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	%	77,46 61,32	97,84 72,59	74,17 76,92	Terjadi penurunan pada LHKPN (-23,67%) dan terjadi peningkatan pada LHKASN (4,33%)
3.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	27	4	14	Terjadi peningkatan (10%)
4.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Nilai	66,76	66,76	66,35	Terjadi penurunan (-0,41%) dan Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19
5.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	1	1	Terjadi stagnan (100%)
6.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	0	24,36	24,12	Terjadi penurunan (-0,24%)

- Analisis terhadap pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani sejak tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan peningkatan dan tercapai 100%. Hal ini disebabkan adanya dukungan anggaran dan SDM Aparatur Pengawasan serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu

bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

- Analisis terhadap pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN sejak tahun 2019 s.d. 2021. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2021, hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketaatan/kepatuhan pejabat negara dan ASN dalam pelaporan harta kekayaan yang dimiliki. Pencapaian di tahun 2020 dengan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 97,84% dan kepatuhan penyampaian LHKASN sebesar 72,59%. Sedangkan pencapaian ditahun 2021 terhadap LHKPN menjadi 74,14% dan LHKPN mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 76,92%. Pencapaian ini berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN ini upaya – upayan telah dilakukan antara lain sosialisasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan meningkatkan kesadaran oleh ASN atas penyampaian Laporan Harta Kekayaannya. Namun hal yang penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.
- Analisis terhadap pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi sejak tahun 2019 s.d 202, hal ini baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2021, dimana pada tahun 2019 penyampaian pelaporan penerimaan gratifikasi melalui UPG sebanyak 27 laporan, sedangkan pada tahun 2020 hanya 4 laporan dan tahun 2021 sebanyak 14 laporan yang disampaikan ke UPG. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi belum maksimal, meskipun belum semua penerimaan/penolakan gratifikasi ini melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi maupun ke Unit Gratifikasi KPK-RI. Namun dari capaian ini telah menunjukkan adanya kesadaran dari penerima untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas

pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi, pembentukan UPG dan diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi. Sekarang ini yang baru ada UPG pada perangkat daerah baru 3, yaitu di BPSDM, RSJD Atma Husada Mahakam dan RSUD Kanujoso Balikpapan.

- Analisis terhadap Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda sejak tahun 2019 telah dicapai dengan nilai 66,67 dan pada tahun 2020 kegiatan survey penilaian integritas pemda ini tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sesuai dengan Surat KPK-RI dan BPS, namun capaiannya masih menggunakan capaian tahun 2019 sebesar 66,67 dan tahun 2021 telah dicapai 66,35 skor/nilai. Pencapaian ini berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh KPK-RI bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang penilaiannya dilakukan pada Perangkat Daerah, Pengguna Layanan dan Ekspert secara acak melalui aplikasi e-SPI KPK-RI. Dalam rangka peningkatan hasil atau skor/nilai yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 75 skor/nilai beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan menindaklanjuti laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh KPK-RI dan meningkatkan perilaku antikorupsi.
- Analisis terhadap Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM sejak tahun 2019 s.d. 2021 hal ini sudah dibangun dengan menetapkan pilot project ZI menuju WBK/WBBM kepada perangkat daerah yang bersifat pelayanan, dan ditahun 2018 telah ditetapkan Perangkat Daerah RSUD Kanujoso Balikpapan sebagai ZI Menuju WBK dan pada tahun 2019 ini kembali diusulkan RSUD Kanujoso Balikpapan untuk ZI menuju WBBM dan pada tahun 2020 dan 2021 ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada RSUD AW. Syahrani. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, bahwa hasil evaluasi belum memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian

PAN-RB untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Birokrasi dari Korupsi).

- Evaluasi terhadap Reformasi Birokrasi pada Pemda dan Perangkat Daerah dimulai tahun 2020 dan Tahun 2021. Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2020 mencapai 24,36 nilai atau dengan capaian 67,11%, dan tahun 2021 mencapai 24,12 nilai atau dengan capaian 66,45% dari target yang ditetapkan sebesar 36,30 nilai. Pada tahun 2021 ini terjadi penurunan nilai hasil evaluasi. Penilaian dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah yaitu Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Bappeda, BKD, Disperindagkop, RSUD AWS, RSUD Kanujoso dan RSJD Atma Husada Mahakam. Penilaian meliputi terhadap aspek pengungkit dan reform, dari hasil penilaian diperoleh angka rata-rata nilai reformasi birokrasi atas 10 PD tersebut mencapai 24,12 nilai. Hasil rekomendasi penilaian RB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (a) membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c). Konsensus Asesor PMPRB, (d). Pembentukan Agent of Change, (e). Identifikasi dan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian Struktur Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan birokrasi, (h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i). Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k). Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPI, dan ZI (l). Maklumat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya – upaya diantaranya melakukan sosialisasi / bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 4 : Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5-1) *100
1.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	2	3	3	Terjadi stagnan (100%)
2..	Tenaga Fungsional yang Pengawasan bersertifikat	Orang	36	46	46	Terjadi stagnan (100%)

- Analisis terhadap Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat sejak tahun 2019 s.d. 2021 sudah dilakukan penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan level 3, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan dimana hasil evaluasi dari 6 (enam) elemen penilaian, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola. 3 (tiga) elemen berada pada Level 2, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Praktik Profesional dan 3 (tiga) elemen berada pada Level 3, yaitu Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola. Dari penilaian keseluruhan berada pada Level 3. Pada tahun 2021 upaya-upaya mempertahankan capaian pada level 3 telah dilaksanakan, antara lain dengan melaksanakan dan mengikutsertakan SDM / Auditornya pada kegiatan Diklat Audit Kinerja dan telah dibuatkan Pedoman Dalam melakukan Audit Kinerja, perencanaan profesional setiap SDM/Auditor sudah dibuat dari mulai perencanaan diklat, kebutuhan diklat dan diklat-diklat yang pernah diikuti oleh SDM/Auditor sudah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan mengikutsertakan SDM/Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Diklat Manajemen Risiko baik yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Pihak Ketiga (Swasta) dan Perencanaan yang dibuat sudah berbasis risiko dengan membuat pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Yang Berbasis. Selanjut terhadap perangkat daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka

penyusunan identifikasi risiko sampai pada tingkat rencana tindak lanjutnya. Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan Penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian.

- Analisis terhadap Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat sejak tahun 2019 s.d. 2021, hal ini sudah dilaksanakan dan mengalami peningkatan dari 39 orang tahun 2017, 36 orang ditahun 2018 terjadi penurunan disebabkan adanya yang pensiun dan ditahun 2019 sebanyak 44 orang dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 46 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 46 orang. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi dan mengikutserta SDM Aparatur Pengawasan pada Diklat dan Ujian Sertifikasi Auditor. Pada tahun 2021 terjadi penambahan pada SDM aparatur pengawasan dari STAN sebanyak 8 orang sebagai Calon Auditor.

3. Membandingkan Realiasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (RPJMD/Renstra).

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yang didasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan terget jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang juga dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, bahwa pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terdapat Indikator yang harus dicapai dalam Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ada 2 indikator sesuai dengan misi 5 dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, yaitu :

- a. Level Maturitas SPIP Pemda.
- b. Hasil Survey Penilaian Integritas

Perbandingan pencapaian terhadap 2 indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra (2023)	Realisasi (Tahun 2021)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	4	3	Tahun 2019 capaian pada level 2 dan pada Tahun 2020 s.d. 2021 terjadi peningkatan capaian yaitu pada level 3.
2.	Hasil Survey Penilaian Integritas	Nilai	75	66,35	Tahun 2019 capaian Penilaian Integritas ini 66,67 nilai dan pada Tahun 2020 tidak ada nilai, karna adanya pandemi covid-19, SPI tidak dilaksanakan. Pada Tahun 2021 terjadi penurunan yaitu dari 66,67 menjadi 66,35

- Analisis pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda, sejak tahun 2019 s.d. 2021 berada pada Level 3, penilaian telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2020 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5. Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.
- Analisis terhadap Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda sejak tahun 2018 telah dicapai dengan nilai 67,55 dan pada tahun 2019 dicapai dengan nilai 66,76 dan pada tahun 2020 kegiatan Survey Penilaian Integrotas (SPI) tidak dilaksanakan sesuai dengan surat KPK-RI dan BPS dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Dengan demikian hasil pencapaian tahun 2020 ini mengacu pada pencapaian tahun 2019 sebesar 66,67 skor. Kalau dilihat dari tahun ke tahun pencapaian nilai SPI bervariasi atau ada yang mengalami peningkatan, stagnan dan penurunan. Untuk meningkatkan integritas di Pemda Prov. Kaltim berdasarkan hasil SPI tersebut, dimana kita harus melaksanakan dan menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh KPK, yaitu : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika

yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya. (b). Penguatan whistleblowing system untuk meningkatkan partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem merit dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Pada tahun 2021 target kinerja yang menjadi target Standar Nasional adalah 3 target kinerja yaitu Maturitas SPIP Pemda, Kapabilitas APIP dan Penilaian Integritas (SPI), hal ini sesuai penancangan yang dilakukan oleh Presiden RI bahwa Maturitas SPIP Pemda dan Kapabilitas APIP secara Nasional harus berada di level 3 dan hal ini dapat dicapai dan dapat dipertahankan. Sedangkan pencapaian penilaian Integritas (SPI) berada dibawah standar nasional yaitu dengan capaian 66,35 skor/nilai.

Terhadap 3 indikator kinerja ini sudah dicapai pada tahun 2021 terhadap Standar Nasional adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6 (5/4)*100
1.	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	3	3	100,00
2.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	3	100,00
3.	Penilaian Integritas Pemda (SPI)	Skor/ Nilai	66,35	75	88,47

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah dan Akan Dilakukan

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021, yaitu terdapat 4 sasaran dengan 17 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau terjadi peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan sebagaimana uraian berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5-1) *100
1.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	WTP	Capai atas Opini WTP dapat dipertahankan. (100%)
2.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	%	0	0	1	Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya tidak ada dan tahun ini ada 1 PD (Tinggi) (25%)
3.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	95,39	96,38	75,00	Terjadi penurunan capaian, hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19. (-21,38%)
4.	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	3	3	3	Capaian pada level 3 dapat

						dipertahankan. (100%)
5.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	28	29	29	Tetap 29 OPD (100%)
6.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	81	80	Terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena rekomendasi belum seluruhnya ditindak lanjuti (-1%)
7.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	%	62,50	65,00	75,00	Terjadi peningkatan atas tindak lanjut (10%)

- Analisis pencapaian pada indikator kinerja Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terjadi stagnan atau dapat dipertahankan yaitu diperolehnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini WTP sejak tahun 2018 s.d. 2021. Pencapaian opini WTP ini terhadap LKPD Pemda dapat dipertahankan, hal ini disebabkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda antara lain membuat Laporan Keuangan LKPD Pemda Provinsi telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern dan adanya Kepatuhan/ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan BPK-RI. Upaya-upaya lain / solusi yang sudah dilakukan dalam rangka mempertahankan Opini WTP ini adalah, antara lain : Diterapkannya kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adanya perbaikan atas penatausahaan persediaan, perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, sertifikasi tanah dan pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual serta terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

- Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik baru dilaksanakan pada tahun 2019-2021 hal ini dilakukan dalam rangka penilaian terhadap kinerja perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan yang berisiko tinggi berdasarkan identifikasi resiko yang dibuat. Sejak tahun 2019 s.d. 2020 ini belum ada perangkat daerah yang berkinerja baik/tinggi, hasil audit menunjukkan kinerja perangkat daerah masih berada pada kisaran sedang dan pada tahun 2021 baru ada 1 perangkat daerah yang berkinerja baik/tinggi yaitu RSJD Atma Husada Mahakam.

Hal ini disebabkan antara lain penilaian kinerja untuk masing-masing kegiatan atas penilaian aspek kinerja (yang meliputi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Perencanaan Indikator Kinerja dan Penganggaran, Pengujian Substantif atas Capaian IKU, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan) dan Audit Kinerja yang sesuai dengan 3 E (efisien, efektif dan ekonomis) terhadap program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah hasil yang dicapai belum sesuai dengan bobot/standar yang dipersyaratkan sesuai dalam Pedoman Audit Kinerja.

Upaya-upaya / solusi agar penilaian kinerja perangkat daerah bernilai baik, antara lain adalah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya, kemungkinan terlalu tinggi bobot/standar yang dipersyaratkan, sehingga sulit untuk dicapai untuk perangkat kinerja yang baik, dan selanjutnya perlukan adanya revisi atas pedoman tersebut.

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Capaian program dan Kegiatan Perangkat Daerah terjadi peningkatan pada tahun 2019-2020, sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya anggaran yang difocusing sebesar 50% dikembalikan pada akhir tahun sekitar bulan Oktober 2021, sehingga menyebabkan adanya perubahan perencanaan dan penganggaran, masih dalam suasana pandemi covid-19, sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan melalui virtual/zoom meeting yang berpengaruh terhadap serapan/realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Upaya – upaya / solusi yang harus dilakukan antara lain dalam rangka meningkatkan capaian ini adalah untuk maksimalnya penyerapan anggaran yang tertuang dalam Program dan Kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meningkat monev melalui Aplikasi TEPPRA, melaksanakan rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA setiap 3 bulan sekali.

- Analisis pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda, sejak tahun 2018 s.d. 2021 berada pada Level 3, penilaian telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2019 s.d. 2021 pada level 3.

Pencapaian level 3 ini didasarkan pada hasil penilaian yang menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5. Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.

Upaya-upaya atau solusi yang dilaksanakan dalam rangka mempertahankan Maturitas SPIP Pemda pada Level 3, antara lain melakukan pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi yang didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian dapat segera teridentifikasi.

- Analisis Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B sejak tahun 2019 s.d. 2020 pencapaiannya mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun yaitu 19 di tahun 2017, 25 di tahun 2018 dan 28 di tahun 2019, dan 29 pada tahun 2020 dan 29 di tahun 2021.

Upaya-upaya atau solusi yang sudah dilaksanakan diantaranya adalah dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak/berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya perangkat daerah dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

- Analisis terhadap Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sejak tahun 2019 s. d. 2020 mengalami peningkatan dalam tingkat penyelesaiannya terhadap rekomendasi / saran yang disampaikan dalam hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan BPK-RI dan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, meningkatnya jumlah rekomendasi temuan dan masih adanya rekomendasi tahun sebelumnya yang sulit untuk ditindak lanjuti.

Upaya-upaya dilaksanakannya dalam rangka meningkatkan penyelesaian tindak lanjut adalah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

- Pencapaian persentase pelanggaran disiplin ASN yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 75 % dari rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 4 pengaduan masyarakat terkait disiplin ASN yang telah ditindak lanjuti dengan penjatuhan disiplin ASN, namun dari 4 pengaduan tersebut, ada 3 rekomendasinya sudah dibuatkan Surat Keputusan Penjatuhan Disiplin ASN, 1 rekomendasi dalam proses. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, karena dari 4 rekomendasi terkait hukuman disiplin, 3 sudah ditindak lanjuti dan 1 rekomendasi dalam proses pembuatan surat ketetapan/keputusan atas status hukuman yang diberikan. Pada tahun 2021 ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN yang dilakukan oleh ASN, dan hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/ASN yang bersangkutan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi penjatuhan disiplin ASN tersebut, antara lain : Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur yang fungsinya membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, Meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, Meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/ASN dalam rangka pembentukan karakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai/PNS.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5-1) *100
1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	8	6	6	Pencapaian target sdh tercapai/ tetap (100%)
2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori " B "	Kab/Kota	4	6	8	Terjadi peningkatan (2%)

- Analisis terhadap Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD dari tahun 2019 s.d. 2021 mengalami peningkatan, yaitu dari 5 Kab/Kota di tahun 2017 dan 2018 meningkat 8 Kab/Kota di tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 6 Kab/Kota pada Tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami stagnan menjadi 6 Kab/Kota yang mendapat predikat B / Sangat Tinggi.

Peningkatan ini disebabkanb adanya perubahan kreteria /standar/ template penilaian/evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Upaya-upaya atau solusi yang dilaksanakan dalam rangka meningkat kinerja pemda Kab/Kota diperlukan adanya komitmen dari Kepala Daerah pada Pemda Kab Kab/Kota tersebut dan data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK), meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Kementerian Dalam Negeri serta Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

- Analisis terhadap pencapaian Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B sejak tahun 2019 s.d. 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 6 Kab/Kota dengan katagori B, hal ini didasarkan atas hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 8 Kab/Kota yang mendapat Sakip dengan katagori B.

Upaya-upaya atau solusi yang dilaksanakan dalam rangka meningkat capaian kinerja ini adalah antara lain membuat dan menetapkan rancana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, yaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5-1) *100
1.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100	100	100	Pencapaian 100%
2.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	%	77,46 61,32	97,84 72,59	74,17 76,92	Terjadi penurunan pada LHKPN (-23,67%) dan terjadi peningkatan pada LHKASN (4,33%)
3..	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	27	4	14	Terjadi peningkatan (10%)
4.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Nilai	66,76	66,76	66,35	Terjadi penurunan (-0,41%) dan Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19
5.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju	PD	1	1	1	Terjadi stagnan (100%)

	WBK/WBBM						
6.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	0	24,36	24,12	Terjadi penurunan (-0,24%)	

- Analisis terhadap pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani sejak tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan peningkatan, hal ini disebabkan adanya dukungan anggaran dan SDM Aparatur Pengawasan serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.
- Analisis terhadap pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN sejak tahun 2019 s.d. 2021. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2021. Dari hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya peningkatan dalam kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan baik LHKPN dan LHKASN Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran ASN atas penyampaian Laporan Harta Kekayaannya.

Upaya – upaya atau solusi dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan tersebut antara lain yang dilakukan adalah selalu mengingatkan kepada ASN atas kewajibannya menyampaikan LHKPN dan LHKASN dan adanya pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

- Analisis terhadap pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi sejak tahun 2019 s.d 2021, hal ini baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2021, dimana pada tahun 2019 penyampaian pelaporan penerimaan gratifikasi melalui UPG sebanyak 27 laporan, sedangkan pada tahun 2020 hanya 4 laporan dan pada tahun 2021 sebanyak 14 laporan yang disampaikan ke UPG. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi belum maksimal yang dilaporkan ke UPG.

Upaya – upaya atau solusi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja ini antara lain adalah mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan dan penolakan gratifikasi, pembentukan UPG dan diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi, dimana sampai dengan tahun 2021 baru ada 3 UPG Pembantu di perangkat daerah yaitu di BPSDM, RSJD Atma Husada Mahakam dan RSUD Kanujoso Balikpapan.

- Analisis terhadap Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda sejak tahun 2019 s.d. 2021. Capaian pada tahun 2021 adalah dengan nilai 66,35. Kalau dilihat capaian ini, terjadi penurunan di tahun 2021 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan masih ditemukan perilaku koruptif baik yang Perangkat Daerah, Pengguna Layanan dan Ekspert.

Upaya – upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ini adalah antara lain : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya. (b). Penguatan whistleblowing system untuk meningkatkan partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem merit dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya

termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

- Analisis terhadap Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM sejak tahun 2019 s.d. 2021 masih berada pada 1 perangkat daerah yaitu RSUD Kanujoso Djatiwobowo Balikpapan. Pada tahun 2021 sudah ditetapkan dan sudah dibangun dengan menetapkan pilot project ZI menuju WBK/WBBM kepada perangkat daerah yang bersifat pelayanan seperti RSUD AW. Syahrani Samarinda, namun setelah dilakukan evaluasi dari hasil evaluasi belum dapat diusulkan ke ZI menuju WBK.

Upaya – upaya yang dilakukan antara lain kepada perangkat daerah yang ditunjuk sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM untuk berkomitmen dan siap dalam memenuhi standar/bobot penilaian ZI sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga penetapan ZI menuju WBK/WBBM dapat tercapai.

- Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,12 nilai atau 66,45%. Pencapaian tahun 2021 terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelum.

Upaya – upaya atau solusi yang dilakukan agar tercapai adalah adanya komitmen dan kesadaran perangkat daerah untuk memenuhi bobot/standar penilaian antara lain memenuhi dokumen penilaian RB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (a) membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c). Konsensus Assesor PMPRB, (d). Pembentukan Agent of Change, (e). Identifikasi dan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian Struktur Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan birokrasi,

(h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i). Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k). Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPI, dan ZI (l). Maklumat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya – upaya diantaranya melakukan sosialisasi / bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 4 : Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5-1) *100
1.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	2	3	3	Terjadi stagnan (100%)
2..	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	Orang	36	46	46	Terjadi stagnan (100%)

- Analisis terhadap Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat sejak tahun 2019 s.d. 2021 sudah dilakukan penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan level 3.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian pada level 3, antara lain dengan melaksanakan dan mengikutsertakan SDM / Auditornya pada kegiatan Diklat Audit Kinerja dan telah dibuatkan Pedoman Dalam melakukan Audit Kinerja, perencanaan profesional setiap SDM/Auditor sudah dibuat dari mulai perencanaan diklat, kebutuhan diklat dan diklat-diklat yang pernah diikuti oleh SDM/Auditor sudah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan mengikutsertakan SDM/Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Diklat Manajemen Risiko baik yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Pihak Ketiga (Swasta) dan

Perencanaan yang dibuat sudah berbasis risiko dengan membuat pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Yang Berbasis. Selanjut terhadap perangkat daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan identifikasi risiko sampai pada tingkat rencana tindak lanjutnya. Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan Penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian.

- Analisis terhadap Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat sejak tahun 2018 s.d. 2020, hal ini sudah dilaksanakan dan mengalami peningkatan dari 39 orang tahun 2017, 36 orang ditahun 2018 terjadi penurunan disebabkan adanya yang pensiun dan ditahun 2019 sebanyak 44 orang dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 46 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 ini ada penambahan SDM Aparatur Pengawasan dari STAN sebanyak 8 orang sebagai Calon Auditor.

Upaya upaya atau solusi yang sudah dilaksanakan adalah adanya penerimaan/rekrutmen dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi dan mengikutserta SDM Aparatur Pengawasan pada Diklat dan Ujian Sertifikasi Auditor.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau dibawah 100% atau ketercapaiannya 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi. Input yang dimiliki dalam hal adalah anggaran dan SDM Aparatur Pengawasan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 12 : Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3		4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	100	80,96	19,04
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	1	100	-75
		c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	75,00	83,21	-8,21
		d.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	100	75	25
		e.	Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	93,55	75,37	18,18
		f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	94,14	91,74	2,40
		g.	Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ ditangani	75	91,74	-16,74
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	100	97,48	2,52
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Katagori " B "	133,00	0	133,00
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	94,00	6,00
		b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :			
				LHKPN		
				74,17	93,48	-19,31
			LHKASN	76,92	93,48	-16,56
		c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	70,00	83,35	-13,35
		d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	88,47	0,00	88,47
		f.	Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai pilot project ZI Menuju WBK/WBBM	100	98,21	1,79
		g.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	44,74	55,26
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	a.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang Bersertifikat	83,64	92,72	-9,08
		b.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	100	64,29	35,71

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian penjanjian/penetapan kinerja tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

- a. Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2021 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 80,96 %. Keberhasilan pencapaian opini atas laporan keuangan Pemda dengan opini WTP telah didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 316.158.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 255.976.400,00 (80,96%). Keberhasilan capaian kinerja 100% ini menunjukkan adanya kesesuaian dukungan program/kegiatan yang telah diserapkan 80,96% dan hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.
- b. Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 4 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 1 satu) perangkat daerah yang berkinerja baik, dengan capaian 25%. Terhadap target kinerja ini memang belum tercapai, meskipun telah didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.160.480.000,00 dan realisasi sebesar Rp.160.480.000,00 (100%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan program/kegiatan sudah memberikan kontribusi yang penting, namun bila dilihat dari capaian kinerja yang hanya 25% belum sebanding dan terjadi inefisiensi. Hal disebabkan karena dari hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan pada perangkat daerah tersebut dari target berkinerja baik belum tercapai, karena masih dalam katagori sedang.
- c. Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 95% dan telah dicapai sebesar 75 % dengan capaian sebesar 78,95%. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub

Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran sebesar Rp.631.378.000,00 dan telah terealisasi/diserap sebesar Rp.525.378.000,00 (83,21%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan program/kegiatan sudah memberikan kontribusi yang penting, namun bila dilihat dari capaian kinerja 83% belum sebanding dan terjadi in efisiensi. Hal disebabkan karena penyerapan capaian program/kegiatan/sub kegiatan dipengaruhi adanya pandemi covid-19 dan anggaran refocusing yang semula tidak dicairkan dan dicairkan pada 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang berakibat adanya perubahan dalam perencanaan kegiatan.

- d. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 yang didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.316.200.000,00 dengan realisasi Rp. 235.378.000,00 (75,00%), bila dibandingkan dengan dukungan anggaran yang telah diserap sebesar 75%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi terhadap anggaran yang telah digunakan dalam mendukung capaian target kinerja tersebut.
- e. Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori \geq B pada tahun 2021 ditarget sebanyak 31 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29 perangkat dengan capaian 93,55%. Pencapaian ini belum sesuai target yang telah, namun telah didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran sebesar Rp.333.808.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 251.600.000,00 (75,37%). Bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan terhadap pencapaian kinerja menunjukkan adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya.
- f. Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2021 dari target 90% dan telah dicapai 81% dengan capaian sebesar

90,00%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan, namun telah didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP alokasi anggaran sebesar Rp.235.178.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.213.750.000,00 (91,74%), hal ini bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja dan dukungan program/kegiatan yang ada terjadi in efisiensi anggaran. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya komitmen Obrik untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut dan masih terdapat temuan-temuan yang lama / lampau yang sulit untuk ditindaklanjuti.

- g. Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani Tahun 2021 dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 75 % dengan capaian 88,24%. Pencapaian kinerja didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan alokasi anggaran sebesar Rp.235.178.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.215.800.000,00 (91,76%). Bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan terhadap pencapaian kinerja, maka terjadi in efisiensi anggaran. Hal ini disebabkan ada beberapa rekomendasi terkait hukuman disiplin ASN belum dibuatkan surat keputusan atas pelanggaran disiplin yang dikenakan, dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur.
- h. Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi ” dalam Evaluasi KPPD Tahun 2021 dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, sub kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp.477.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.465.325.000,00 (97,48%). Bila dibandingkan dengan

pencapaian kinerja dengan dukungan program/kegiatan terjadi efisiensi anggaran.

- i. Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B Tahun 2021 dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 8 Kab/Kota dengan capaian sebesar 133,00%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, sub kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 477.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp.0,00 (0,00%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran. Hal ini disebabkan Inspektorat Daerah tidak melakukan evaluasi, karena telah dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB melalui virtual meeting.
- j. Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani Tahun 2021 dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.345.738.000,00 dan realisasi sebesar Rp.325.000.000,00 (94,00%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dengan dukungan prgram/kegiatan tersebut, maka telah terjadi efisiensi anggaran.
- k. Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN Tahun 2021 dari target 70% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 74,17% dengan capaian 105,96% dan penyampaian LHKASN sebesar 76,92% dengan capaian 109,89%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.95.350.000,00 (93,48%). Pencapaian

kinerja ini dibandingkan dengan dukungan Program/Kegiatan tersebut terjadi efisiensi anggaran.

- l. Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi Tahun 2021 dari target 20 laporan dan telah dicapai 14 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian sebesar 70%, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi masih rendah. Pencapaian ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.500.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp.35.425.000,00 (83,35%). Hal ini menunjukkan telah terjadi efisiensi terhadap anggaran yang dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
- m. Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda (SPI) tahun 2021 ditargetkan sebesar 75 skor dan telah dicapai 66,35% (88,47%). Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.550.000,00, namun anggaran tersebut tidak direalisasikan yang disebabkan karena kegiatan SPI ini tidak dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPK-RI dengan bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- n. Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 1 perangkat daerah sebagai pilot project dengan capaian 100%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp.85.000.000,00 (98,21%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran. Namun terhadap perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project tersebut, setelah dilakukan evaluasi untuk ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM masih rendah.

- o. Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2021 dari target 36,30 skor/nilai dengan capaian 26,12 (71,37%). Pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 36,30 skor/nilai. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.334.370.000,00 dan realisasi sebesar Rp.149.600.000,00 (44,74%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut terjadi in efisiensi anggaran.
- p. Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Tahun 2021 dari target level 3 dan telah dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 162.000.000,00 (64,29%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran.
- q. Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat Tahun 2021 dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar 83,64%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.026.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.879.199.363,00 (92,72%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dukungan program/kegiatan, maka terjadi in efisiensi anggaran.

E. REALISASI ANGGARAN

Dalam sub ini akan menguraikan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2021 sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP	WTP	100	316.158.000	255.976.400	80,96
b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	4	1	25	160.480.000	160.480.000	100
c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	95	75,00	78,94	631.378.000	525.378.000	83,21
d.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	3	100	316.200.000	235.378.000	75,00
e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori \geq B	31	29	93,55	333.808.000	251.600.000	75,37
f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	85	81	95,30	235.178.000	213.750.000	91,74
g.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	85	75	88,24	235.178.000	213.750.000	91,74

- a. Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2021 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 80,96 %. Keberhasilan pencapaian opini atas laporan keuangan Pemda dengan opini WTP telah didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan

Pengawasan Internal, sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 316.158.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 255.976.400,00 (80,96%). Keberhasilan capaian kinerja 100% ini menunjukkan adanya kesesuaian dukungan program/kegiatan yang telah diserapkan 80,96% dan hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

- b. Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2021 ditergetkan sebanyak 4 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 1 satu) perangkat daerah yang berkinerja baik, dengan capaian 25%. Terhadap target kinerja ini memang belum tercapai, meskipun telah didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.160.480.000,00 dan realisasi sebesar Rp.160.480.000,00 (100%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan program/kegiatan sudah memberikan kontribusi yang penting, namun bila dilihat dari capaian kinerja yang hanya 25% belum sebanding dan terjadi in efisiensi. Hal disebabkan karena dari hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan pada perangkat daerah tersebut dari target berkinerja baik belum tercapai, karena masih dalam katagori sedang.
- c. Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2021 ditergetkan sebesar 95% dan telah dicapai sebesar 75 % dengan capaian sebesar 78,95%. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran sebesar Rp.631.378.000,00 dan telah terealisasi/diserap sebesar Rp.525.378.000,00 (83,21%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan program/kegiatan sudah memberikan kontribusi yang penting, namun bila dilihat dari capaian kinerja 83% belum sebanding dan terjadi in efisiensi. Hal disebabkan karena penyerapan capaian program/kegiatan/sub kegiatan dipengaruhi adanya pandemi covid-19 dan anggaran refocusing yang semula tidak dicairkan dan dicairkan pada 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang berakibat adanya perubahan dalam perencanaan kegiatan.

- d. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 yang didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.316.200.000,00 dengan realisasi Rp. 235.378.000,00 (75,00%), bila dibandingkan dengan dukungan anggaran yang telah diserap sebesar 75%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi terhadap anggaran yang telah digunakan dalam mendukung capaian target kinerja tersebut.
- e. Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B pada tahun 2021 ditarget sebanyak 31 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29 perangkat dengan capaian 93,55%. Pencapaian ini belum sesuai target yang telah, namun telah didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran sebesar Rp.333.808.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 251.600.000,00 (75,37%). Bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan terhadap pencapaian kinerja menunjukkan adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya.
- f. Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2021 dari target 90% dan telah dicapai 81% dengan capaian sebesar 90,00%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan, namun telah didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP alokasi anggaran sebesar Rp.235.178.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.213.750.000,00 (91,74%), hal ini bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja dan dukungan program/kegiatan yang ada terjadi in efisiensi anggaran. Hal ini disebabkan kerana masih kurangnya komitmen Obrik untuk melakukan

penyelesaian tindak lanjut dan masih terdapat temuan-temuan yang lama / lampau yang sulit untuk ditindaklanjuti.

- g. Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani Tahun 2021 dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 75 % dengan capaian 88,24%. Pencapaian kinerja didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan alokasi anggaran sebesar Rp.235.178.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.215.800.000,00 (91,76%). Bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan terhadap pencapaian kinerja, maka terjadi in efisiensi anggaran. Hal ini disebabkan ada beberapa rekomendasi terkait hukuman disiplin ASN belum dibuatkan surat keputusan atas pelanggaran disiplin yang dikenakan, dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	6	6	100	477.360.000	465.325.000	97,48
b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori " B "	6	8	133,34	477.360.000	0,00	0,00

- a. Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD Tahun 2021 dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian

tersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, sub kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp.477.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.465.325.000,00 (97,48%). Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja dengan dukungan program/kegiatan terjadi efisiensi anggaran.

- b. Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B Tahun 2021 dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 8 Kab/Kota dengan capaian sebesar 133,00%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, sub kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 477.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp.0,00 (0,00%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran. Hal ini disebabkan Inspektorat Daerah tidak melakukan evaluasi, karena telah dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB melalui virtual meeting.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	100	100	345.738.000	325.000.000	94,00
b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :						
	LHKPN LHKASN	70 70	74,17 76,92	105,96 109,89	102.000.000	95.350.000	93,48

c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20	14	70,00	42.500.000	35.425.000	83,35
d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	75	66,35	84,47	86.550.000	0,00	0,00
e.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	1	1	100	86.550.000	85.000.000	98,21
f.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36,30	24,12	66,45	334.370.000	149.600.000	44,47

- a. Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani Tahun 2021 dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.345.738.000,00 dan realisasi sebesar Rp.325.000.000,00 (94,00%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dengan dukungan prgram/kegiatan tersebut, maka telah terjadi efisiensi anggaran.
- b. Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN Tahun 2021 dari target 70% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 74,17% dengan capaian 105,96% dan penyampaian LHKASN sebesar 76,92% dengan capaian 109,89%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.95.350.000,00 (93,48%). Pencapaian kinerja ini dibandingkan dengan dukungan Program/Kegiatan tersebut terjadi efisiensi anggaran.

- c. Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi Tahun 2021 dari target 20 laporan dan telah dicapai 14 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian sebesar 70%, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi masih rendah. Pencapaian ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.500.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp.35.425.000,00 (83,35%). Hal ini menunjukan telkah terjadi in efisiensi terhadap anggaran yang dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
- d. Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda (SPI) tahun 2021 di targetkan sebesar 75 skor dan telah dicapai 66,35% (88,47%). Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.550.000,00, namun anggaran tersebut tidak direalisasikan yang disebabkan karena kegiatan SPI ini tidak dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPK-RI dengan bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- e. Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 1 perangkat daerah sebagai pilot project dengan capaian 100%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp.85.000.000,00 (98,21%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran. Namun terhadap perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project tersebut, setelah dilakukan evaluasi untuk ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM masih rendah.
- f. Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2021 dari target 36,30 skor/nilai dengan capaian 26,12 (71,37%). Pencapaian ini belum sesuai

dengan target yang ditetapkan yaitu 36,30 skor/nilai. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.334.370.000,00 dan realisasi sebesar Rp.149.600.000,00 (44,74%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut terjadi in efisiensi anggaran.

Sasaran 4 : Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3	3	100	252.000.000	162.000.000	64,29
b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	55	46	83,64	2.026.800.000	1.879.199.363	92,72

- a. Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Tahun 2021 dari target level 3 dan telah dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 162.000.000,00 (64,29%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran.
- b. Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat Tahun 2021 dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar 83,64%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian

Daerah, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.026.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.879.199.363,00 (92,72%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dukungan program/kegiatan, maka terjadi in efisiensi anggaran.

2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan.

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 untuk menunjang program dan kegiatan pengawasan serta kegiatan penunjang lainnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 39.146.734.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.29.293.645.999,00 (74,83%) dengan realisasi fisik 100%. Berikut disampaikan alokasi dan realisasi anggaran masing –masing Program dan Kegiatan tahun 2021, sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.307.481.280,00	20.941.165.588,00	79,61	100
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	419.553.770,00	295.007.716,00	70,31	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	419.553.770,00	295.007.716,00	70,31	100
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.859.291.900,00	14.669.759.385,00	82,14	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.175.860.000,00	14.144.407.194,00	82,35	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	683.431.900,00	525.352.191,00	76,87	100
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.850.080.000,00	2.734.716.525,00	71,03	100

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.390.000,00	146.281.000,00	88,45	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.684.690.000,00	2.588.435.525,00	70,25	100
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.321.372.040,00	2.543.307.303,00	76,57	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.982.962.100,00	1.738.549.975,00	87,67	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.864.500,00	203.181.225,00	99,66	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.495.440,00	101.602.550,00	90,32	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.022.050.000,00	499.973.553,00	48,92	100
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.793.570,00	529.643.124,00	80,52	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	7.376.000,00	18,44	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.214.360,00	45.822.180,00	43,97	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.579.210,00	476.444.944,00	92,77	100
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	199.390.000,00	168.731.535,00	84,62	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.190.000,00	117.307.285,00	79,70	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.200.000,00	33.438.550,00	97,77	100
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000,00	17.985.700,00	99,92	100
II.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	10.104.090.400,00	7.093.609.671,00	70,21	100

1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.268.767.440,00	2.438.315.568,00	74,59	100
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	266.500.000,00	174.580.500,00	65,51	100
	Reviu Laporan Keuangan	801.965.000,00	736.358.300,00	91,82	100
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.366.702.440,00	1.013.725.590,00	74,17	100
	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP	833.600.000,00	513.651.178,00	61,62	100
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.835.322.960,00	4.655.294.103,00	68,11	100
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	250.000.000,00	87.736.662,00	35,09	100
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.585.322.960,00	4.567.557.441,00	69,36	100
III.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.735.162.320,00	1.258.870.740,00	46,03	100
1.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	2.735.162.320,00	1.258.870.740,00	46,03	100
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	552.491.000,00	344.494.676,00	62,35	100
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.182.671.320,00	914.376.064,00	41,89	100
		39.146.734.000,00	29.293.645.999,00	74,83	100

Pada tahun anggaran 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung tugas – tugas dibidang pengawasan telah ditetapkan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 yaitu menetapkan 3 Program, 9 Kegiatan, 23 Sub Kegiatan. Dari 3 Program tersebut, 2 Program

Utama/Prioritas dan 1 Program Penunjang. Alokasi anggaran untuk Program Prioritas sebesar Rp.12.839.252.720,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.352.480.411,00 (65,06%) dan Program Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.307.481.280,00 dengan realisasi anggaran Rp.20.941.165.588,00 (79,61%). Secara keseluruhan anggaran sebesar Rp.39.146.734.000,00 telah direalisasi sebesar Rp.29.293.645.999,00 (74,83%) secara fisik 100%.

Dengan masih adanya pandemi Covid-19 alokasi anggaran untuk semua perangkat daerah difocusing sebesar 50%, namun pada akhir anggaran sekitar bulan Oktober 2021 dikembalikan lagi sehingga menyebabkan adanya perubahan perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan dimaksimalkan penyerapan anggarannya, disisi lain adanya beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan langsung ke lapangan tidak dapat dilaksanakan karena dilaksanakan melalui virtual / zoom meeting. Hal ini tentunya juga akan membawa pengaruh terhadap tidak tercapainya beberapa sasaran kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Terhadap beberapa indikator yang belum tercapai tersebut akan dilakukan evaluasi dalam rangka perbaikan pencapaian pada tahun depan.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2021 yang berisikan capaian dan hambatan-hambatan dalam pencapaiannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020, yaitu terdapat 4 sasaran dan 17 indikator kinerja yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 4 sasaran dan 17 indikator telah dicapai sebesar **90,52%**.

Secara umum dapat dikemukakan pencapaian kinerja organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dan langkah-langkah di masa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam sebagai berikut :

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Capaian WTP.

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 dengan capaian Opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan efektivitas dalam Sistem

Pengendalian Intern serta Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Diharapkan pada tahun – tahun mendatang pencapaian ini akan terus dipertahankan dengan opini WTP dengan melakukan antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan dengan melakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan melalui Simda BMD, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah yang dikuasai pihak lain, sertifikasi tanah pemda, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP serta melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penataan keuangan daerah.

2. Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik dengan Capaian 25%.

Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 4 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 1 (satu) perangkat daerah dengan capaian 25,00%. Diharapkan pada tahun – tahun mendatang terhadap capaian kinerja ini dapat ditingkatkan dengan melakukan upaya – upaya diantaranya adalah (a). Merumuskan pendelegasian wewenang dan kebijakan mendukung terciptanya akuntabilitas dan pengendalian; (b) Membuat kebijakan atau Standar Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan serta pendokumentasian atas pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib. Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dan juga salah faktor tidak tercapainya kinerja yang baik salah satunya adalah pedoman yang dibuat kemungkinan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai untuk perangkat kinerja yang baik, hal ini diperlukan adanya revisi atas pedoman tersebut.

3. *Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan capaian 75,00%*

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 95% dan telah dicapai sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 75,00%. Namun demikian dari capaian tersebut memang terjadi penurunan dan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan ada beberapa program dan kegiatan tidak dilaksanakan karena masih dalam pandemi Covid-19 dan juga dilaksanakan namun belum maksimal, keterbatasan waktu dan SDM, sehingga berpengaruh terhadap capaian program dan kegiatan dalam rangka mendukung penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja tersebut perlu dilakukan upaya-upaya antara lain perlunya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, memaksimalkan sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan juga dilaksanakan juga perlunya rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPRA.

4. *Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim dengan Capaian Level 3*

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3. Dalam rangka untuk mempertahankan pencapaian level 3 ini perlu adanya upaya-upaya diantaranya melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian, meningkatkan pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008, melakukan penilaian dan evaluasi Maturitas SPIP ang meliputi Efektivitas dan Efisiensi,

Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, serta melakukan asistensi dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka pemenuhan data dukung atas Maturitas SPIP. Pada tahun 2021 telah diterbitkan Perka BPKP tentang Maturitas SPIP Terintegrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan melakukan sosialisasi, bimtek dan evaluasi penilaian maturitas SPIP kepada perangkat daerah dilingkungan Pemda Prov. Kaltim.

5. Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B dengan Capaian 29 Perangkat Daerah

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq pada tahun 2021 ditarget sebanyak 31 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29 perangkat dengan katagori BB dan B dengan capaian 100%. Dalam rangka untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja ini kedepan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah..

6. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan Capaian 81%.

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 85% dan telah dicapai 81%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP ini perlu dilakukan upaya-upaya antara lain melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP yang yang lebih pentingnya lagi adanya komitmen dan kesadaran entitas/obrik untuk melaksanakan penyelesaian tindak lanjut serta bila perlu adanya pemberian sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku kepada obrik/entitas yang tidak melaksanakan penyelesaian tindak lanjut.

7. *Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti / Ditangani dengan Capaian 75,00%*

Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 85,00 % dan telah ditindaklanjuti baru mencapai 75,00 % dari rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka meningkatkan tindak lanjut penyelesaian pemberian sanksi sesuai dengan hasil rekomendasi hasil pemeriksaan perlu adanya upaya-upaya antara lain meningkatkan kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, diharapkan hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/ASN yang bersangkutan dan selanjutnya meningkatkan koordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penyelesaian surat ketetapan pemberian sanksi ASN.

8. *Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat "Sangat Tinggi" dalam Evaluasi KPPD dengan Capaian 6 Kab/Kota.*

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian 100%. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota, melakukan asistensi dan pendampingan kepada Pemda Kab/Kota dalam penyusunan LPPD Pemda Kab/Kota dan meningkatkan Sosialisasi/Bimtek/Diklat terkait Penyusunan LPPD Pemda Kab/Kota.

9. Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dengan Capaian 8 Kab/Kota.

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 8 Kab/Kota. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB melalui Zoom Meeting / Vartual. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ini perlu adanya upaya-upaya antara lain : meningkatkan komitmen Pemda Kab/Kota, meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, melakukan penyelesaian atas tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya dan melakukan pendampingan atau asistensi dan melaksanakan Bimtek/Diklat terkait Sakip Pemda Kab/Kota.

10. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dengan Capaian 100%.

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 100% dan telah dicapai ditangani 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat ini telah dilakukan upaya-upaya antara lain adanya dukungan anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk, dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

11. Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKP dan LHKASN dengan Capaian LHKPN, 74,17% dan LHKASN, 76,92%.

Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 70% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 74,17% dan penyampaian LHKASN sebesar 76,92%. Pencapaian ini dari tahun ke tahun diharapkan meningkat dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan antara lain melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, meningkatkan kesadaran ASN atas kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan sebagaimana yang sudah diwajibkan, namun hal yang penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

12. Jumlah Pelaporan Gratifikasi dengan Capaian 14 Laporan

Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 20 laporan dan telah dicapai 14 laporan, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan atas penerimaan dan penolakan gratifikasi belum maksimal. Dalam rangka meningkat pelaporan gratifikasi ini upaya-upaya yang sudah dilakukan antara lain adanya dukungan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi baik langsung maupun melalui website dan telah dibentuk juga Unit Pengendalian Gratifikasi (UPD) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan usaha lain juga diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi. Sekarang ini yang sudah membentuk UPG baru 3 PD yaitu : RSJD Atma Husada Mahakam, RSUD Kanujoso dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

13. Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda dengan Capaian Nilai 66,35 Nilai/Skor

Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda yang ditargetkan pada nilai 75 dengan capaian 66,35 nilai/skor ini berdasarkan Laporan Tim Penyusunan SPI KPK-RI Tahun 2021 atas Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2021, dimana pada tahun 2020 kegiatan SPI tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19. Capaian di tahun 2021 ini juga dipengaruhi karena masih ditemukan perilaku koruptif baik pada Perangkat Daerah, Pengguna Layanan dan Ekspert.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya antara lain : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya. (b). Penguatan whistleblowing system untuk meningkatkan partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem merit dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan

SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

14. Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM dengan Capaian 1 (satu) Perangkat Daerah.

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pilot project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah adalah pada RSUD AW. Syahrani, namun berdasarkan hasil evaluasi belum dapat dan layak untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk Zona Integritas WBK, karena masih terdapat beberapa indikator penilaian yang angka belum maksimal. Dalam rangka untuk penetapan ZI WBK/WBBM pada perangkat daerah diperlukan upaya-upaya antara lain adalah adanya komitmen dari Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan ZI, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pendampingan dan asistensi kepada perangkat yang ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM, membuat rencana aksi serta melakukan beberapa perbaikan dan pemenuhan dokumen sesuai dengan hasil rekomendasi evaluasi yang telah dilaksanakan.

15. Nilai Refirmasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Capaian 24,12 Nilai/Bobot.

Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,12 nilai/bobot dari target nilai/skor 36,30. Hal ini menunjukkan belum tercapainya atas target yang ditetapkan yaitu 36,30 nilai/bobot. Dalam rangka pencapaian target Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperlu upaya-upaya antara lain adanya komitmen dari Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan 8 area yang ada dalam reformasi birokrasi, melakukan monitoring dan evaluasi RB Perangkat Daerah, membuat rencana aksi RB OPD, melakukan Sosialisasi / Bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB OPD, dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi

16. Level Kapabilitas APIP Inspektorat dengan Capaian Level 3.

Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai level 3, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya antara lain membuat rencana kerja / rencana aksi atas beberapa rekomendasi yang disampaikan dan selanjutnya melaksanakan dan menindak lanjuti rekomendasi tersebut dan melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan sebagai instansi Pembina SPIP dan Kapabilitas APIP.

17. Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dengan Capaian 46 Orang.

Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 ada penambahan SDM Aparatur Pengawasan dari STAN sebanyak 8 orang sebagai Calon Auditor. Dalam rangka meningkatkan jumlah SDM Aparatur Pengawasan sudah dilakukan beberapa upaya antara lain mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan baik penjenjangan, fungsional, substantif, keahlian dan profesi, Workshop dan Seminar yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan baik yang bersifat fungsional dan substantif, melakukan rekrutmen ASN dari CPNS melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan mutasi antar instansi bagi ASN yang berminat menjadi pejabat fungsional pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat, agar dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan bahan evaluasi untuk capaian kinerja tahun depan.

Samarinda, 24 Januari 2022

INSPEKTUR,



DR. H. M. IRFAN PRANANTA, SE,MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19740818 199703 1 006

DAFTAR LAMPIRAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Pemda Prov. Kaltim Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
		Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	85	Belum optimalnya tindak lanjut atas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	6	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/kota
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori " B "	6	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN	65	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
		LHKASN	65		dan LHKASN di kali 100%.	LHKASN
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	70	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	1	Belum semua perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36,30	Belum dilaksanakan penilaian Reformasi Birokrasi terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Permenpan-RB	Pencapaian angka bobot/nilai sesuai dengan data pemenuhan dan reform	Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian RB Perangkat Daerah
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP
		Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	50	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
					anggaran Program dan Kegiatan di kali 100%	
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level 3	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di Pemda Prov. Kaltim	Laporan Hasil Evaluasi BPKP
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori $\geq B$	31 PD	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	85 %	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
		Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	85 %	Belum optimalnya tindak lanjut atas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	6 Kab/kjota	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/kota
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori " B "	6 Kab/Kota	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100 %	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
				penyelenggaraan Pemda.	bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Pengaduan Masyarakat
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	70 % 70 %	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN dan LHKASN di kali 100%.	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20 Laporan	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	75 Skor/ Nilai	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	1 PD	Belum semua perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	39,30 Nilai / Bobot	Belum dilaksanakan penilaian Reformasi Birokrasi terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Permenpan-RB	Pencapaian angka bobot/nilai sesuai dengan data pemenuhan dan reform	Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian RB Perangkat Daerah
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP
		Tenaga Fungsional yang Pengawasan bersertifikat	55 Orang	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
		Daerah		berdasarkan hasil pemeriksaan operasional	Kegiatan Peangkat Daerah di bagi pagu anggaran Program dan Kegiatan di kali 100%	Operasional
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level 3	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di Pemda Prov. Kaltim	Laporan Hasil Evaluasi BPKP
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	34 PD	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	95 %	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
		Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	95 %	Belum optimalnya tindak lanjut tas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaa di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	7 Kab/kjota	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori " B "	8 Kab/Kota	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100 %	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas	Jumlah pengaduan masyarakat yang	Laporan Hasil Pemeriksaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
		yang ditangani		pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Atas Pengaduan Masyarakat
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	75 % 75 %	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN dan LHKASN di kali 100%.	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	35 Laporan	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	80 Skor/ Nilai	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	1 PD	Belum semua perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36,30 Nilai / Bobot	Belum dilaksanakan penilaian Reformasi Birokrasi terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Permenpan-RB	Pencapaian angka bobot/nilai sesuai dengan data pemenuhan dan reform	Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian RB Perangkat Daerah
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Perlu nya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP
		Tenaga Fungsional yang Pengawasan bersertifikat	60 Orang	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target/ Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Realisasi	Capaian (%)
				pemeriksaan operasional	Anggaran Program dan Kegiatan di kali 100%	LRA Simda Keuangan		
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di Pemda Prov. Kaltim	Laporan Hasil Evaluasi BPKP	3	100
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	31	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	29	93,55
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	85	Belum optimalnya perangkat daerah yang merindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	81	95,30
		Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	85	Belum optimalnya tindak lanjut pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan di kali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin	75	88,24
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	6	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota	6	100
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori " B "	6	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	8	133,34
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target/ Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Realisasi	Capaian (%)
	(KKN)			masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Masyarakat		
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	70 70	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN dan LHKASN di kali 100%.	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	74,17 76,92	105,96 109,89
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi	14	70
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	75	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey	66,35	88,47
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	1	Belum semua perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai pilot project Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM	1	100
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP	3	100
		Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	55	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian	46	83,64